

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah sebuah lembaga penegak hukum yang berdiri pada tanggal 29 Desember 2003. KPK didirikan sebagai lembaga hukum yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejak berdirinya KPK, lembaga ini sudah berhasil menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang ditangani KPK adalah kasus Jaksa Urip Gunawan dalam kasus suap BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) senilai 6,1 milyar, yang kini kasus tersebut sudah ditangani dengan dijebloskannya Jaksa Urip Gunawan dalam penjara. Menurut catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), hingga tahun 2007 KPK sudah menyelesaikan 82 kasus korupsi dengan total nilai kasus 1.413,29 miliar (Kompas, 28 September 2009)

Berbagai penanganan kasus korupsi yang telah berhasil ditangani oleh KPK, dinilai oleh masyarakat sebagai lembaga penegak hukum yang berani bertindak untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Keberhasilan KPK sebagai lembaga hukum mulai tersandung masalah hukum dengan munculnya kasus Antasari Azhar yang merupakan pimpinan KPK, yang diduga sebagai dalang pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen yang mati terbunuh akibat ditembak sehabis pulang bermain golf pada 14 Maret 2009.

Belum tuntasnya Kasus Antasari Azhar, publik kembali dikejutkan lagi dengan munculnya kasus yang berhubungan dengan para pimpinan KPK, selain kasus Antasari Azhar. Berbeda dengan kasus Antasari Azhari yang diduga karena urusan pribadi sedangkan Kasus Bibit - Chandra terkait dengan KPK sebagai lembaga hukum pemberantas korupsi. Kasus Bibit dan Chandra tersebut bermula dari testimoni dari Antasari Azhar yang merupakan mantan Ketua KPK. Testimoni yang ditulis Antasari Azhar yang diungkapkan pada 4 Agustus 2009, saat menjalani proses hukum terkait kasus yang sedang dihadapi oleh Antasari. Testimoni itu mengungkapkan adanya dugaan penyuaipan dari Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo kepada para pimpinan KPK, yang tengah menangani kasus korupsi penanganan radio terpadu di Departemen Kehutanan yang melibatkan petinggi PT Masaro (Kompas, 12/ 09/09).

Testimoni Antasari Azhar membuat empat pimpinan KPK diperiksa oleh kepolisian terkait dugaan penyuaipan dari Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo kepada pimpinan KPK dan penyalahgunaan kewenangan. Empat pimpinan KPK, yang diperiksa di Mabes Polri pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, antara lain Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin.

Hasil pemeriksaan pimpinan KPK oleh POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), ditetapkannya dua pimpinan KPK yaitu Bibit dan Chandra, sebagai tersangka pada tanggal 15 September 2009 atas dugaan korupsi dan penyelewengan kekuasaan. (KR, 16 /09/ 2009).

Kasus Bibit - Chandra sebagai pimpinan KPK yang tugasnya memberantas kasus korupsi di Indonesia, namun terkait dengan dugaan korupsi dan penyelewengan kewenangan. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh POLRI, dalam hal ini POLRI berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga hukum yang menangani kasus hukum yang terjadi di Indonesia termasuk kasus Korupsi. Penanganan proses hukum kasus Bibit - Chandra yang ditangani oleh POLRI diharapkan agar KPK, selanjutnya tidak menjadi lembaga hukum yang “*superbody*” atau lembaga super yang dapat terlibat dalam kasus hukum, seperti kasus Bibit dan Chandra. Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan walaupun KPK dimispersepsikan sebagai lembaga super, hal itu lebih karena KPK memiliki kewenangan yang diemban polisi dan kejaksaan sekaligus. Kewenangan satu atap ini adalah kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Juwana pun menambahkan,

“Meski demikian, harus diakui kewenangan super memang rentan untuk disalahgunakan dan disalahtafsirkan oleh mereka yang mengembannya. Di sinilah semua personel KPK harus betul- betul dapat memaknai tugasnya” (Kompas, 10 Agustus 2009)

Berjalannya proses hukum penanganan kasus Bibit - Chandra, kemudian muncul isu bahwa penangkapan pimpinan KPK merupakan hasil rekayasa yang tujuannya untuk melemahkan lembaga KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Rekayasa pelemahan KPK didasarkan pada adanya bukti rekaman yang sementara berada ditangani Ketua KPK sementara,

Tumpak Hatorangan Panggabean. Isu rekayasa pelemahan KPK terkuak setelah rekaman tersebut diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi dan disebarluaskan di media masa. Rekaman pembicaraan tersebut berisikan skenario berupa upaya rekayasa yang dilakukan oleh para koruptor yang melibatkan beberapa pejabat kepolisian untuk melemahkan KPK dengan cara menyeret para pimpinan KPK dalam kasus hukum korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Padahal kasus Bibit dan Chandra tengah ditangani oleh pihak POLRI. Pada kasus rekayasa penangkapan Bibit dan Chandra yang merupakan pimpinan KPK menimbulkan istilah yaitu Kriminalisasi KPK. Munculnya istilah kriminalisasi KPK terkait beredarnya rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi KPK yang dilakukan oleh beberapa oknum Polri. Pada kasus Bibit - Chandra juga muncul istilah lainnya yaitu Cicak VS Buaya, yang melambangkan konflik dua lembaga hukum di Indonesia yaitu KPK dan POLRI.

Persoalan kasus Bibit - Chandra membuat Presiden SBY membentuk Tim Pencari Fakta atau yang dikenal dengan Tim 8 yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Pembentukan Tim 8 gunannya untuk mengusut kasus tersebut.

Kasus yang menyeret pimpinan KPK, Bibit dan Chandra sebagai tersangka mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dan media. Bahkan Presiden SBY dalam pidatonya pada hari Senin malam (23/11), menyampaikan pidato tentang proses hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Dalam Pidatonya SBY berujar bahwa :

“Kasus tersebut telah mendapat perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandung kebenaran”.

(http://korupsi.vivanews.com/news/read/108339pidato_lengka_p_sby_tentang_century_dan_kpk) (diakses 25 Mei 2010)

Kasus Bibit - Chandra berdasarkan konflik yang terjadi antara dua buah lembaga hukum di Indonesia, yaitu KPK dan POLRI. Hal tersebut tentunya menarik untuk ditelaah lebih lanjut pemberitaan mengenai KPK dan POLRI yang dimuat dalam berita di surat kabar. KPK yang merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia sedang terkait masalah dengan korupsi itu sendiri. Sama halnya dengan POLRI sebagai badan hukum negara yang bertugas menangani hukum di Indonesia, namun adanya upaya untuk mengkriminalisasi KPK.

Kasus Bibit - Chandra merupakan peristiwa yang diulas oleh surat kabar sehingga kasus Bibit-Chandra merupakan suatu berita. Salah satu media massa adalah surat kabar. Pemilihan surat kabar dalam penelitian ini menggunakan SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat. Pemilihan lebih dari satu media cetak untuk melihat fakta-fakta yang terdapat dalam SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat. Fakta yang dipahami sangat bergantung pada media yang apa yang dibaca. Media tertentu akan sangat berbeda dengan media yang lain dalam mengungkap fakta (Nurudin, 2009 : 75). Fakta-fakta tersebut adalah pemberitaan KPK dan

Polri dalam kasus Bibit - Chandra yang diulas di kedua surat kabar tersebut. Pemberitaan tersebut akan diteliti oleh penulis untuk

melihat objektivitas pemberitaan yang diulas di kedua surat kabar tersebut, yaitu SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat. Pemilihan SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat berdasarkan jenis distribusinya surat kabar, menurut lingkup distribusinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu surat kabar nasional dan surat kabar lokal. Pemilihan SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat bukan hanya berdasarkan lingkup distribusinya. Pemilihan SKH Kompas berdasarkan bahwa kasus Bibit - Chandra berhubungan dengan kepentingan nasional. Pemilihan SKH Kompas juga didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh dari surat kabar tersebut sebagai salah satu surat kabar terbaik nasional (<http://nasional.kompas.com/read/2009/10/28/17400052/Dua.Koran.Per.sda.Masuk.10.Besar.Koran.Berbahasa.Indonesia.Terbaik>) (diakses 25 Mei 2010)

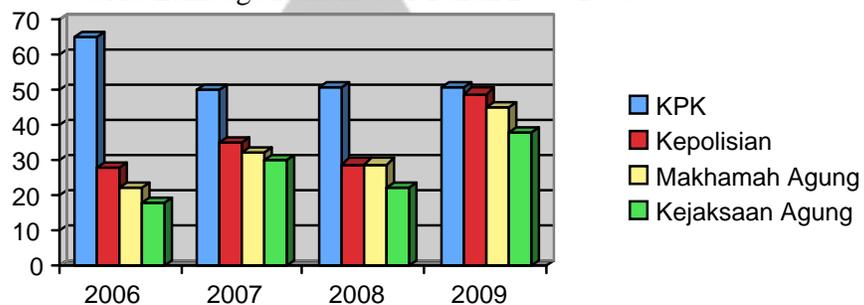
Pemilihan Kedaulatan Rakyat sebagai media pembanding berdasarkan bahwa kasus Bibit - Chandra bukan hanya mendapat sorotan secara nasional, tapi juga menjadi berita yang diulas di koran lokal. Kedaulatan Rakyat yang merupakan koran lokal yang berasal dari Yogyakarta sebagai daerah yang dikenal sebagai “Indonesia mini”, dimana banyak orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia tinggal di Yogyakarta dan memiliki berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Pemilihan surat kabar dikarenakan memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan media elektronik. Effendy (2003 : 119) menjelaskan bahwa; pers yakni surat kabar merupakan sarana cetak yang memungkinkan berita-berita yang disiarkan dapat dibaca berulang-ulang dan terdokumentasikan, sehingga dapat dijadikan bukti otentik untuk suatu keperluan. Surat

kabar selain memiliki kelebihan juga sebagai salah satu media yang memiliki fungsi untuk memberi informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi (Uchayana Onong, 2003 :149).

Pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit-Chandra mendapat ulasan dari surat kabar. Kasus Bibit - Chandra yang diulas oleh surat kabar akan diteliti oleh penulis mengenai objektivitas pemberitaan KPK dan Polri. Ada banyak kriteria yang untuk mengamati objektivitas sebuah berita. Satu diantaranya dengan cara objektivitas yang disampaikan oleh Westerthal. Komponen obyektivitas pemberitaan itu sendiri oleh, mencakup dua faktor faktualitas dan imparialitas. Faktualitas yang mengandung nilai kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*). Faktor impartialitas yang mencerminkan keseimbangan (*balance*) dan netralitas (*neutrality*) (Nurudin, 2009 ; 82).

Pemberitaan tersebut tentunya dapat berpengaruh pada citra dua lembaga hukum tersebut. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas untuk menilai citra lembaga hukum dari tahun 2006 – 2009.

BAGAN 1.1
Citra Lembaga Hukum dari Tahun 2006-2009



(Sumber: Kompas, 28 September 2009)

Berdasarkan bagan 1.1 di atas, citra KPK sebagai lembaga hukum mengalami penurunan ke arah yang negatif. Sedangkan, citra Polri dimata masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2006-2009. Citra KPK memiliki presentase yang tinggi pada tahun 2006 dan mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2009. Sedangkan, citra Polri memiliki citra lembaga hukum yang paling rendah presentasinya pada tahun 2006 dan presentase citra lembaga hukum semakin menaik terutama pada tahun 2009 yang merupakan presentase citra lembaga hukum yang paling tinggi dari tahun 2009-2006.

Pemberitaan mengenai dua lembaga hukum yaitu KPK dan Polri dalam kasus Bibit - Chandra, baik berita yang positif atau negatif dapat berpengaruh pada kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Pemberitaan baik negatif atau positif dapat memimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat pada organisasi atau lembaga tersebut (Ruslan, 2007:76).

Adanya konflik antara KPK dan Polri dalam kasus Bibit dan Chandra, terkait hal tersebut maka akan dilihat bagaimana objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit dan Chandra yang diulas menjadi berita di kedua surat kabar, yaitu di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana objektivitas pemberitaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dalam kasus Bibit - Chandra yang diulas di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September - 2 Desember 2009?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan KPK dan POLRI yang terkait mengenai berita Kasus Bibit - Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September - 2 Desember 2009.
2. Untuk mengetahui perbedaan objektivitas pemberitaan KPK dan POLRI yang terkait mengenai berita Kasus Bibit - Chandra dalam kedua surat kabar, SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca
Memberikan gambaran tentang objektivitas pemberitaan KPK dan POLRI dalam Kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September sampai dengan 2 Desember 2009.
2. Bagi penulis
Memberikan kesempatan dalam mempraktekan dan mengaplikasikan berbagai teori yang telah penulis pelajari berkaitan dengan tema penelitian yang penulis sedang teliti.

E. Kerangka Teori

1. Berita

Berbicara mengenai berita banyak sekali definisi mengenai berita. Berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak (Suhandang,2004:104). Water Lippman dalam McQuail (1987:191) mendefinisikan berita sebagai sebuah isyarat jelas yang objektif yang memberitakan suatu peristiwa. Pada dasarnya, sebuah berita berita harus bersifat aktual sehingga dapat menarik khalayak untuk membacanya. Selain itu, berita harus menyajikan fakta-fakta tentang suatu peristiwa. Wahyudi (1992:124) menyatakan bahwa berita merupakan uraian peristiwa yang penting, menarik, aktual dan harus disajikan secara cepat kepada khalayak. William S. Maulsby (Assegaff, 1991:24) mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan yang benar dan tidak memihak dari fakta - fakta yang mempunyai arti yang penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang membaca berita tersebut. Menurut Nancy Nasution mendefinisikan berita sebagai sebagai berikut:

“Laporan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang ingin diketahui oleh umum, dengan sifat-sifat aktual, terjadi lingkungan pembaca, mengenai tokoh terkemuka, akibat peristiwa tersebut berpengaruh terhadap kehidupan pembaca” (Basuki dalam Abrar, 1995:3).

Berbagai definisi berita dia atas dapat disimpulkan bahwa berita merupakan laporan berbagai peristiwa penting dan menarik yang berupa fakta yang bersifat aktual dan obyektif yang disampaikan kepada khalayak dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berita merupakan bagian dari jurnalisme, dimana pengertian jurnalisme itu sendiri adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses mencari, mengolah dan menyiarkan informasi kepada khalayak dan disebarkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik (Nurudin, 2009 : 9). Peristiwa yang terjadi tidak semanya dilaporkan untuk menjadi sebuah peristiwa oleh media massa. Peristiwa yang sudah menjadi berita harus melalui proses dahulu untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak. Dengan demikian, segala sesuatu yang diperoleh dari peliputan peristiwa (reportase), wawancara maupun pengumpulan bahan penulisan (data) yang baru akan dilaporkan, belum merupakan berita. Hal tersebut baru menjadi berita setelah dilaporkan melalui media massa (Iriantara, 2006 : 79).

Laporan peristiwa yang akan disebarluaskan pada khalayak harus memiliki unsur-unsur agar menjadi sebuah berita yang mengandung informasi pokok, unsur yang terkandung dalam isi laporan peristiwa tersebut, antara lain :

- a. Peristiwa apa yang terjadi *(What)*
- b. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut *(Who)*
- c. Kapan peristiwa tersebut terjadi *(When)*
- d. Dimana peristiwa tersebut terjadi *(Where)*
- e. Mengapa peristiwa tersebut terjadi *(Why)*
- f. Bagaimana kejadian peristiwa tersebut *(How)*

Unsur penulisan berita tersebut diatas kemudian dikenal dengan istilah 5W+1H, sehingga berita yang dibuat harus mempertimbangkan unsur 5W+1H. Penekanan unsur-unsur yang terdapat di istilah 5W+1H (Iriantara, 2006:82) adalah:

- a. Unsur *What* , yang menekankan pada aspek apa dari suatu peristiwa.
- b. Unsur *Who*, yang memberi penekanan pada manusia dibalik satu peristiwa.
- c. Unsur *When* , yang menekankan pada sisi waktu satu peristiwa
- d. Unsur *Where*, yang menekankan pada sisi ruang atau tempat satu peristiwa
- e. Unsur *Why*, yang menjelaskan bagaimana satu peristiwa itu terjadi
- f. Unsur *Who*, yang menekankan pada proses terjadinya peristiwa

Berbagai peristiwa yang terjadi tidak semua peristiwa layak untuk menjadi sebuah berita yang dilaporkan kepada khalayak. Peristiwa yang akan menjadi berita harus memiliki nilai berita untuk dapat dilaporkan agar menarik minat orang untuk membacannya. Ashadi siregar (1998:27) menjelaskan bahwa berita dikatakan mempunyai nilai berita sebagai berikut; *significance* (penting), *magnitude* (besar), *timelines* (waktu), *proximity* (dekat), *prominence* (tenar), *human interest* (manusiawi). *Significance* adalah suatu kejadian diberitakan apabila berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. *Magnitude* adalah kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak. *Timeliness* adalah kejadian yang diberitakan baru saja ditemukan atau baru saja terjadi. *Proximity* dapat diartikan sebagai kedekatan. Disini *Proximity* dapat berarti kedekatan psikografis dan kedekatan

geografis. Proximity psikografis diukur untuk mengukur informasi yang memiliki kedekatan emosi dan psikologis seperti ikatan kekeluargaan, ras, agama, profesi dan sebagainya. Sedangkan *Proximity* geografis digunakan untuk mengukur informasi yang memiliki kedekatan geografis yakni kedekatan ruang atau jarak. *Prominence* adalah menyangkut faktor keterkenalan, hal yang terkenal bisa berupa benda atau orang. *Human interest* adalah kejadian yang diberitakan memberi sentuhan perasaan pada pembaca.

Laporan peristiwa yang sudah menjadi berita memiliki format penyajian yang akan ditampilkan disurat kabar tersebut disajikan dalam beberapa macam format tulisan berita. Menurut Siregar (1998:154) format tulisan antara lain *straight news*, *hard news*, *soft news* dan *feature*

a. *Straight news* dan *hard news*

Lebih mementingkan fakta atau realitas tanpa menambahkan opini penulis. Opini penulis memang harus dihindarkan untuk menjaga keobyektifan dari suatu berita. Struktur penulisannya menggunakan struktur piramida terbalik, yaitu diawali dengan mengemukakan hal-hal yang paling penting, diikuti bagian yang dianggap agak penting, tidak penting, dan seterusnya. Berita dengan format ini memiliki unsur 5W+1H.

b. *Soft news*

Merupakan berita ringan, artinya berita di luar kejadian utama tetapi masih berkaitan dengan berita utama.

c. Feature

Merupakan gabungan antara fakta dan opini. Biasanya mengandung nilai-nilai human interest yang dapat membangkitkan perasaan pembacanya, menguras rasa simpati dan membangkitkan emosi.

Berita merupakan produk dari jurnalistik, dimana melalui sebuah proses agar dapat disebarluakan pada khalayak. Berita ditulis berdasarkan fakta yang dikumpulkan oleh wartawan. Wartawan mencari dan mengumpulkan fakta lewat pengamatan (observasi), wawancara, riset dokumentasi, konperensi pers, press release. Pengertian observasi secara sederhana, yaitu pengamatan terhadap realitas sosial melalui pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung bila ia menyaksikan sebuah peristiwa dengan mata kepalannya sendiri, baik dalam waktu yang pendek atau panjang. Pengamatan tidak langsung bila ia tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi, namun mendapat keterangan dari orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut. Wawancara adalah tanya jawab antara seorang wartawan dengan nara sumber untuk mendapatkan data tentang sebuah fenomena. Riset dokumentasi dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh fakta yang berasal dari dokumentasi tertulis. Fakta yang dimaksud bisa berupa angka yang dituangkan dalam tabel, bisa berupa bagan, atau wacana yang tersimpan sebagai dokumen yang diarsip (Siregar, 1998: 50). Konperensi pers adalah suatu pernyataan yang disampaikan seseorang yang mewakili sebuah lembaga mengenai kegiatannya kepada para wartawan. Biasanya menyangkut citra lembaga, peristiwa yang sangat penting dan bersifat

insidental (Abrar, 1995: 26). *Press release* diartikan sebagai siaran pers yang dikeluarkan oleh satu lembaga, satu organisasi atau seseorang individu secara tertulis pada wartawan (Abrar, 1995 : 27).

Fakta-fakta yang terkumpul yang diperoleh wartawan saat mencari berita. Fakta-fakta tersebut salah satunya berasal dari berbagai nara sumber. Nara sumber adalah seseorang atau tokoh yang ikut mengomentari, memberi keterangan, penilaian, ide, dan pendapat, sebagai pelengkap dan pengkayaan nilai berita dari berbagai sudut pandang dalam peristiwa yang terjadi yang akan dijadikan berita. Narasumber diperlukan untuk membuat berita menjadi lebih baik. Berita yang baik merupakan berita yang diperoleh dengan menerapkan aturan *cover both sides* yaitu mencari data bukan hanya dari satu pihak tapi dari berbagai pihak sehingga berita menjadi obyektif bukan subyektif dan berimbang (*balance*). Berita yang berkualitas berarti menampilkan narasumber atau sumber berita yang terjamin kapabilitasnya dalam memberikan kesaksian atau informasi tentang peristiwa yang diberitakannya. Narasumber yang dipilih haruslah memiliki keahlian di bidangnya, keterkaitan dengan peristiwa dan bisa dipercaya (Kriyantono, 2008 : 111).

Laporan peristiwa yang akan dijadikan berita dan akan disajikan di surat kabar, tersusun berdasarkan komposisi berita. Menurut Suhandang (2004 : 50) ,komposisi berita yang terdapat dalam sebuah berita antara lain :

a. *Headline*

Atau disebut judul, biasanya juga sering dilengkapi dengan anak judul. Judul memudahkan para pembaca untuk segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan serta untuk menonjolkan satu berita. Judul harus dibuat menarik agar orang tertarik untuk membacanya. Judul yang baik harus dibuat harus mencerminkan isi berita, karena judul merupakan inti sari berita.

b. *Dateline*

Ada yang terdiri atas nama media massa, tempat dan tanggal kejadian, ada pula yang terdiri atas nama media massa dan tempat kejadian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan tempat kejadian dan inisial media.

c. *Lead*

Biasa dikenal dengan sebutan teras berita. Biasa ditulis pada paragraf pertama setelah berita. Ia juga merupakan unsur paling penting dari sebuah berita yang menentukan apakah isi berita akan dibaca atau tidak secara menyeluruh oleh khalayak. Ia merupakan sari pati sebuah berita yang melukiskan seluruh berita secara singkat.

d. *Body* (tubuh berita)

Isinya menceritakan peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat padat dan jelas, dengan demikian “*body*” merupakan uraian lengkap dari berita.

2. Elemen Kualitas Berita di Surat Kabar

Elemen kualitas berita di surat kabar dapat dilihat dengan mengukur objektivitas berita. Peneliti dalam menggunakan perspektif objektivitas untuk melihat kecenderungan objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September sampai 2 Desember 2009.

Objektivitas bisa jadi hanya merupakan salah satu dari syarat – syarat sebuah berita, namun objektivitas pun memiliki peranan penting sebagai kunci bagi khalayak untuk menilai apakah berita tersebut dapat dipercaya dan reliabel (McQuails, 1992:183). Melalui perspektif inilah peneliti ingin melihat kecenderungan objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam Kasus Bibit dan Chandra dengan melihat pada *factuality* -yang terdiri atas kebenaran (*truth*), informativitas (*informativeness*) dan relevansi (*relevance*). Juga melihat *impartiality* – yang terdiri dari netralitas (*neutrality*) dan keseimbangan (*balance*) yang ditekankan dalam prinsip objektivitas.

Berita yang diteliti mengenai pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit dan Chandra adalah berita yang diulas di surat kabar. Berita merupakan salah satu produk dari surat kabar. Surat kabar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan media elektronik, yang menyiarkan pemberitaan seperti radio dan televisi. Menurut Effendy (2003 : 21) ditinjau dari ilmu komunikasi sifat surat kabar adalah sebagai berikut :

a. Terekam

Berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun dalam alinea, kalimat yang terdiri atas huruf-huruf yang dicetak pada kertas. Dengan demikian, setiap peristiwa atau hal yang diberitakan terekam sedemikian rupa sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat diulang kaji, dan dapat dijadikan dokumentasi serta dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu.

b. Menimbulkan perangkat mental secara aktif

Berita surat kabar yang dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan huruf yang tercetak “mati” di atas kertas, maka untuk dapat mengerti maknanya pembaca harus menggunakan perangkat mentalnya secara aktif, dan wartawan yang menyusun berita (pesan) harus menggunakan bahasa yang umum dan lazim sehingga para pembacanya mudah mencernanya.

Kelebihan surat kabar dengan sifatnya yang terekam dapat menjadi bukti otentik akan suatu peristiwa yang diulas menjadi berita.

Berita itu sendiri merupakan laporan sebuah peristiwa. Laporan peristiwa tersebut untuk menjadi sebuah berita harus melalui suatu proses untuk kemudian dilaporkan dan disebarluaskan kepada khalayak. Laporan peristiwa berasal dari realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga berita merupakan bentukan dari realitas. Berita mengenai Kasus Bibit - Chandra yang diulas di surat kabar, merupakan realitas yang dibentuk oleh wartawan ketika memproses sebuah laporan peristiwa menjadi berita. Realitas yang terbentuk dalam berita dapat dianalisis untuk melihat objektivitas pemberitaan

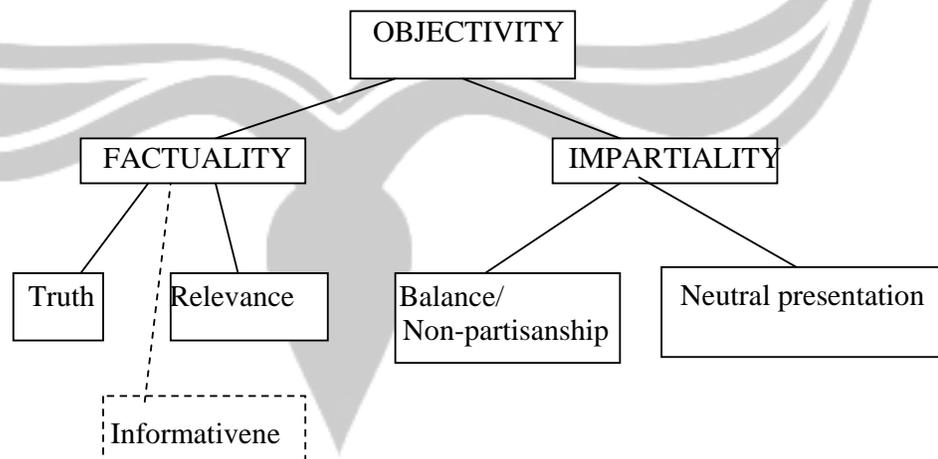
mengenai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Polisi Republik Indonesia) dalam kasus Bibit - Chandra.

Berita yang objektif dapat diukur menggunakan metode Westerthal yang mencantumkan kriteria-kriteria untuk mengukur obyektifitas pemberitaan antara lain kebenaran (*truth*), relevansi (*relevance*), informatif (*informativeness*), netralitas (*neutrality*) dan keseimbangan (*balance*) untuk mengukur obyektifitas pemberitaan. Obyektifitas adalah satu poin yang harus dilaksanakan dan dianut sepenuhnya oleh institusi pers. Karena dengan obyektifitas inilah keberadaan berita akan bisa benar-benar menjadi sumber informasi yang ideal bagi khalayak.

Untuk kajian lebih jelasnya, maka masing-masing akan digambarkan dalam skema klasifikasi menurut westertahl mengenai aspek-aspek obyektifitas seperti berikut ini. (McQuail, 1992: 96).

BAGAN 1.2

Objektivitas Berita Menurut Westerstahl (198



(Sumber : McQuail 1992:96)

Dalam skema klasifikasi tersebut, Westerthal membedakan objektifitas ke dalam 2 wilayah; kognitif dan evaluatif. Dengan memisahkan dimensi evaluatif dari dimensi kognitif, penelitian ini memiliki pandangan yang mempertentangkan nilai dengan fakta bahwa nilai bisa dipisahkan dari fakta. Penelitian mengenai obyektifitas ini akan sangat sulit dilakukan jika tidak mengikuti pembagian seperti ini.

McQuail menyatakan bahwa aspek kognitif berita sangat terkait dengan faktualitas. Faktualitas dikaitkan dengan bentuk penyajian laopran tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber dan disajikan tanpa komentar. (McQuail, 1992 : 130). Untuk itu faktualitas memiliki tiga aspek utama yaitu kebenaran (*truth*), *informativeness* dan *relevance* (McQuail, 1992:197).

Kebenaran (*truth*) yang berarti dalam kajian praktisi jurnalistik adalah berita harus bersifat faktual, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kebenaran lebih menyangkut pada aspek-aspek reliabilitas dan kredibilitas sebuah berita. Penerapannya dalam penelitian ini adalah bahwa berita yang akan diteliti harus berdasarkan atas sesuatu peristiwa yang telah terjadi, ada konfirmasi baik itu dari faktor yang terlibat atau pihak yang terkait atau pihak yang berwenang. Jadi bukan semata-mata berita yang merupakan murni interpretasi atau opini dari wartawan dan peliput. Kemudian McQuail membagi kebenaran dalam 3 sub- aspek yakni *factualness* yaitu pemisahan antara fakta dengan opini, *accuracy* yaitu kecermatan data yang diberikan seperti misalnya nama, angka, tempat dan waktu dan terakhir *completeness* yaitu kelengkapan data.

Informativeness berkaitan dengan pemahaman audiens tentang semua hal seperti misalnya peristiwa yang terjadi, benda maupun manusia. Disini semakin banyak informasi yang diberikan oleh media tersebut berarti semakin lengkap nilai informasi yang dimiliki oleh media tersebut menyangkut kasus korupsi yang bersangkutan.

Relevance berkaitan dengan standar kualitas proses seleksi berita (McQuail 1992:203). Relevansi mensyaratkan perlunya proses seleksi yang dilaksanakan menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan calon penerima dan masyarakat. Menurut McQuail (1983), relevan atau tidaknya aspek-aspek realitas yang diberitakan bisa ditentukan dengan *normative standards*, *real world indicators*, *audience* dan *journalistic*. Berita yang menggunakan aspek relevansi adalah berita yang memuat unsur-unsur yang saling berkaitan; judul, narasumber dan permasalahan yang digali saling memiliki keterkaitan dan merujuk pada fokus berita.

Aspek selanjutnya yakni imparsialitas. Dalam model Westerthal, aspek evaluatif berkaitan dengan ketidakberpihakan (*impartiality*). *Impartiality* berkaitan dengan sikap wartawan yang menjauhkan sikap pribadi dan subjektivitas terhadap hal yang akan diliputnya. Dalam memproses sebuah fakta, wartawan harus menghindari evaluasi subjektivitas. Wartawan harus memisahkan antara fakta dengan opini. McQuail membedakan Imparsialitas menjadi 2 yaitu *balance* dan *neutrality*. *Balance* berkaitan erat dengan proses seleksi dan substansi sebuah berita (McQuail 1992:223). Secara lebih mudah, *balance* dapat dipahami sebagai sebuah tolak ukur

keseimbangan; tiap elemen mendapatkan kesempatan dan jatah yang sama dalam berita baik dalam mengemukakan pendapat maupun jumlah paragraf yang diberikan. Apabila itu tidak dipenuhi, maka berita tersebut dapat dikategorikan tidak berimbang. Elemen ini memperhitungkan berbagai sisi, aktor dan kepentingan dalam berita. Balance mensyaratkan adanya *equal or propotional accses* yaitu pemberian akses, kesempatan yang sama kepada semua aktor yang terlibat dan *even handed evaluation* yakni pemberian ruang yang sama kepada setiap pihak untuk memberikan pemilihan penilaian positif maupun negatif yang berimbang untuk semua pihak yang diberikan dalam setiap pelaporan berita.

Aspek netralitas (*neutrality*) berarti berita bersifat netral, tidak memihak condong kepada salah satu pihak . Pada dasarnya, netralitas menempatkan berita pada posisi yang seimbang dan tidak melebih-lebihkan fakta. Netralitas lebih berhubungan dengan presentasi fakta itu sendiri yang dapat dievaluasi dari penggunaan kata-kata, cita, dan *frames of reference* yang bersifat evaluatif dan juga penggunaan gaya presentasi yang berbeda. Netralitas termanifestasi dalam berita dan ditentukan dengan penyajian yang non-evaluatif dan non-sensational. Dalam penelitian ini, netralitas dapat dilihat apakah media memihak kepada salah satu pihak yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Polri (Polisi Republik Indonesia). Bila aspek *balance* memberikan keseimbangan dalam pemberitaan, maka netralitas memberikan pemberitaan yang tidak memihak.

F. Kerangka Konsep

Penelitian ini untuk melihat objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam Kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September sampai dengan 2 Desember 2009. Peneliti untuk mengukur objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam Kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat dengan cara analisis isi sampel berita selama periode 11 September sampai dengan 2 Desember 2009. Analisis selanjutnya akan dilakukan dengan membuat unit analisis dan kategorisasi untuk mengukur objektivitas pemberitaan di kedua surat kabar tersebut menggunakan objektivitas Westerthal. Adapun unit analisis dan kategorisasi untuk mengukur objektivitas sebagai berikut :

TABEL 1.1

Definisi Operasional

No.	Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi
1.	<i>Truth</i>	Jenis Fakta	a. Fakta Sosiologis b. Fakta Psikologis
2.		Kelengkapan unsur 5 W+1H	a. Lengkap, mengandung semua unsur 5 W+ 1H b. Tidak Lengkap, tidak mengandung salah satu unsur dari 5W+1H
3.	<i>Informative</i>	Panjang paragraf	a. Panjang, lebih dari 10 paragraf b. Sedang, antara 6-10 paragraf c. Pendek, kurang dari 6 paragraf
4.	<i>Relevance</i>	Pernyataan nara sumber	a. Relevan b. Tidak relevan
5.		Nilai berita	a. Lebih dari 3 nilai berita b. Kurang dari 3 nilai berita
6.	<i>Balance</i>	Tipe liputan	a. Multi sisi b. Dua sisi c. Satu sisi
7.	<i>Netral presentation</i>	Arah berita	a. Berita cenderung memihak pada KPK b. Berita cenderung memihak pada Polri c. Berita cenderung tidak memihak KPK atau Polri

G. Definisi Operasional

Unit analisis dan kategorisasi tersebut merupakan acuan untuk melihat objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit - Chandra dalam SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September-2 Desember 2009.

Sesuai dengan kerangka teori di atas, penulis kemudian menurunkannya ke dalam unit-unit analisis seperti yang terdapat di dalam kerangka konsep berdasarkan aspek obyektivitas pemberitaan.

Penulis memasukkan unsur obyektifitas pemberitaan menurut Westerstahl sebagai tolak ukur untuk melakukan penelitian ini. Seperti yang sudah dituliskan di atas bahwa obyektifitas dibagi ke dalam 2 aspek; *factuality* dan *impartiality*. *Factuality* dibagi ke dalam 3 kriteria yaitu *truth*, *relevance* dan *informativeness*. Sedangkan *Impartiality* dibagi ke dalam 2 kriteria yaitu *Balance* dan *Relevance*. Adapun aspek objektivitas menurut Westerstahl terdiri dari :

1. *Factuality*

a. *Truth*

Kebenaran (*truth*) yang berarti dalam kajian praktisi jurnalistik adalah berita harus bersifat faktual, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengukur *truth* dengan melihat fakta dan melihat apakah berita sudah memiliki standar praktik jurnalistik yakni 5W + 1H: *what* (apa), *who* (siapa), *when* (kapan), *where* (dimana), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Setidaknya unsur - unsur ini harus terkandung dalam berita tersebut untuk menjadikan berita tersebut memiliki minimum informasi. Kelengkapan informasi ini penting untuk

mendapatkan pemahaman pembaca yang utuh terhadap peristiwa/fakta yang tersaji dalam berita yang pada akhirnya akan menunjang aspek *truth* sebuah berita. *Truth* diukur dengan:

1. Jenis fakta dalam berita, untuk melihat apakah berita tersebut disusun dengan bahan baku yang berupa peristiwa atau hanya interpretasi terhadap sebuah peristiwa. Jenis fakta dikategorikan dengan :
 - a. Fakta sosiologis, yaitu fakta yang disusun berupa peristiwa atau kejadian yang nyata atau faktual
 - b. Fakta Psikologis, yaitu berita tersebut disusun berdasarkan interpretasi subjektif yang berupa opini dalam bentuk pernyataan, penilaian, dan pendapat sumber berita. Misalnya terdapat kata-kata: seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, diramalkan, seolah, agaknya, kontrovensi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata opini lainnya.
2. Kelengkapan unsur 5 W+1H, yaitu untuk melihat apakah berita tersebut memberikan informasi yang lengkap kepada khalayak.
 - a. Lengkap, mengandung semua unsur 5 W+ 1H : berita tersebut memenuhi kelengkapan unsur 5W+1H
 - b. Tidak Lengkap, tidak mengandung salah satu unsur dari 5W+1H: berita tersebut dalam ulasannya tidak mengandung unsur 5W+1H

Adapun penjelasan unsur 5W+1H :

1. Peristiwa apa yang terjadi (What)
2. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut (Who)
3. Kapan peristiwa tersebut terjadi (When)
4. Dimana peristiwa tersebut terjadi (Where)
5. Mengapa peristiwa tersebut terjadi (Why)
6. Bagaimana kejadian peristiwa tersebut (How)

b. *Informativeness*

Berita yang memiliki nilai informasi yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian. Maksudnya semakin tinggi nilai informasi yang terkandung dalam sebuah berita maka akan semakin rendah tingkat ketidakpastiannya. Semakin rendah tingkat ketidakpastiannya maka semakin tinggi *informativeness* berita tersebut. *Informativeness* sendiri diukur dengan menggunakan panjang berita. Panjang berita menunjukkan kelengkapan nilai informasi yang disampaikan terhadap sebuah kasus. Panjang berita dikategorikan menjadi :

1. Panjang, lebih dari 10 paragraf. Semakin banyak paragraf yang digunakan, berarti menunjukkan semakin lengkap dan beragam informasi yang disajikan. Untuk itu jika sudah melebihi 10 paragraf maka dalam penelitian ini, berita tersebut dikategorikan panjang.
2. Sedang, 6 – 10 paragraf. Berita dapat dikategorikan sedang jika berita itu terdiri dari 6 - 10 paragraf, yang memungkinkan berita tidak memiliki kelengkapan informasi seperti kategori pertama.

3. Pendek, kurang dari 6 paragraf. Berita yang dianggap tidak memiliki kelengkapan informasi atas kasus atau hanya berupa informasi ringan bagi pembaca atau juga dianggap sebagai informasi yang penting, sehingga sejumlah paragraf hanya mendapat porsi yang sedikit.

c. *Relevance*

Relevansi merupakan istilah kunci dalam menilai kualitas seleksi berita. Relevansi (*relevance*) adalah bahwa berita atau unsur-unsur yang termuat didalamnya harus saling berkaitan satu sama lain, bahwa setiap aktor yang termuat dalam berita itu harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat atau argumennya. Relevansi berita juga dilihat dengan melihat nilai berita yang terkandung di berita tersebut, dengan memiliki nilai berita sebagai kelayakan dimuat atau tidaknya berita tersebut. Di penelitian ini, relevansi pemilihan sumber berita serta nilai berita tersebut.

1. Informasi Keterkaitan Narasumber Dalam Berita

Dalam sebuah berita, sumber berita dilihat sebagai sebuah fakta. Idealnya, sumber berita adalah orang yang mengalami peristiwa yang bersangkutan (pelaku), saksi peristiwa atau ahli yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Penting kiranya untuk mencantumkan informasi keterkaitan narasumber dan kapasitasnya dijadikan sumber berita. Pernyataan nara sumber, yaitu sebagai indikator apakah pernyataan nara sumber yang diulas di pemberitaan berhubungan langsung

dengan tema dan fokus pemberitaan. Idealnya, sumber berita adalah orang yang mengalami peristiwa yang bersangkutan (pelaku), saksi peristiwa atau ahli yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Penting kiranya untuk mencantumkan informasi keterkaitan nara sumber dan kapasitasnya untuk dijadikan nara sumber berita. Hal tersebut dapat dilihat dengan merujuk pada isi berita dengan melihat kalimat sebelum dan sesudah pernyataan dari nara sumber yang ditempatkan dalam pemberitaan. Adapun pengkategorianya:

a. Relevan

Apabila terdapat informasi yang lengkap dan jelas mengenai narasumber dan keterkaitan narasumber dalam kasus atau berita. Bila terdapat informasi mengenai narasumber dan keterkaitannya dalam kasus/berita maka berita tersebut dikategorikan relevan.

b. Tidak relevan

Bila tidak ada informasi yang jelas mengenai narasumber dan keterkaitannya dengan kasus atau berita. Apabila masuk dalam kategori ini maka dapat dikategorikan tidak relevan.

2. Nilai Berita

Nilai berita merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk melihat kelayakan sebuah berita. Semakin lengkap nilai berita yang terkandung di dalamnya, maka semakin layak sebuah peristiwa untuk diberitakan. Adapun kategorinya:

- a. Lebih dari 3 nilai berita: berita tersebut mengandung lebih dari 3 nilai berita, yang berarti berita tersebut semakin lengkap.
- b. Kurang dari 3 nilai berita: berita tersebut mengandung kurang dari 3 nilai berita, yang berarti berita tersebut kurang lengkap.

Ashadi siregar (1998:27) menjelaskan bahwa berita dikatakan mempunyai nilai berita sebagai berikut; *significance* (penting), *magnitude* (besar), *timelines* (waktu), *proximity* (dekat), *prominence* (tenar), *human interest* (manusiawi). Nilai berita tersusun dari enam tingkatan sebagai berikut (Siregar,1998:30):

PENTING
Significance
Timeliness
Magnitude
Proximity
Prominence
Human Interest
 MENARIK



Berita yang termasuk dalam kategori *significance* adalah berita – berita yang mengandung nilai berita *significance*, *timeliness*, *magnitude*, dan *proximity*. Sementara berita yang mengandung nilai berita *prominence* dan *human interest* termasuk dalam kategori *human interest*.

2. Impartiality

a. Balance

Balance sering diartikan sebagai keseimbangan atau ketidakberpihakan dalam pemberitaan. Keseimbangan biasanya meliputi indikator keterlibatan semua perspektif dan pendapat

serta dialokasikan sama atau proposional dan seimbang. Disini dilihat berapa banyak media memberikan tempat bagi salah satu pihak untuk memberikan pendapat. Dengan mengukur besarnya ruang dan waktu tersebut, dapat dilihat arah kecenderungan pemberitaan sebuah media. Dalam penelitian ini, *balance* diukur dengan melihat Tipe Liputan (1, 2 atau multi sisi). Unit analisis ini akan dibagi kedalam 2 kategori :

1. 1 Sisi

Bila isi berita tentang kasus Bibit - Chandra mencerminkan 1 corak atau versi yang sama walaupun sumber info berbeda-beda

2. 2 Sisi

Bila isi berita tentang kasus Bibit - Chandra mencerminkan memiliki 2 corak atau versi

3. Multi Sisi

Bila isi berita tentang kasus kasus Bibit - Chandra mencerminkan multi sisi.

b. *Neutrality*

Netralitas (*neutrality*) berarti bahwa berita harus bersifat netral, tidak condong kepada suatu pihak. Di sini netralitas diukur dengan melihat arah pemberitaan, yaitu bagaimana berita bersikap terhadap peristiwa tersebut. Netralitas dapat dilihat pernyataan nara sumber yang dikutip oleh jurnalis, jumlah nara sumber yang seimbang, dan juga bahasa yang digunakan oleh jurnalis dalam menampilkan berita tersebut.

1. Lebih memihak pada KPK : apabila pemberitaan tersebut mengandung pernyataan, kalimat, kata dan istilah terutama yang mengandung atau memberikan gambaran positif yang mendukung KPK.
2. Lebih Memihak pada Polri : apabila pemberitaan tersebut mengandung pernyataan, kalimat, kata dan istilah terutama yang mengandung atau memberikan gambaran positif yang mendukung Polri.
3. Netral : berita tidak memihak pada KPK atau Polri.

H. Metodologi Penelitian

1. Teknik Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis isi dalam penelitian ini karena analisis isi merupakan sebuah metode yang salah satu tujuannya adalah menggambarkan karakteristik pesan-pesan dalam ranah publik melalui perantaraan teks (Frey et al., 1991:212). Menurut Berleson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick dalam Kriyantono, 2006 : 230)

Sistematis berarti bahwa segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematis, mulai dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya, maupun kategori yang dipakai untuk menganalisisnya. Analisis isi lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak (*tersurat/manifest/nyata*) (Kriyantono, 2006 : 61).

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka dipilih analisis isi sebagai metodenya. Berkaitan dengan ini, diambil definisi dari Klaus Krippendorff sebagai berikut :

Content Analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from data to their context. Lebih lanjut Krippendorff mengutip pendapat Barelson, content analysis is defined as a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication. (Krippendorff, 1991:21)

Penggunaan analisis isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail dalam buku *Mass Communication Theory* (2000:305) mengatakan bahwa tujuan dilakukan analisis isi terhadap isi pesan komunikasi adalah :

- a. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media
- b. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial.
- c. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serat sistem kepercayaan masyarakat
- d. Mengetahui fungsi dan efek media
- e. Mengevaluasi *media performance*
- f. Mengetahui apakah ada bias media

2. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1988:63). Peneliti berusaha mendeskripsikan kecenderungan objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit - Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan

Rakyat dalam rentang waktu pemberitaan antara periode 11 September 2009 sampai 2 Desember 2009.

Terdapat tahap-tahap dalam penelitian ini yang harus dilalui sebelum melakukan analisis. Tahap yang pertama adalah menentukan rumusan masalah. Dalam analisis isi yang relatif sempit kajiannya, maka rumusan masalah yang diangkat haruslah spesifik. (Putranto dalam Birowo (ed.), 2004:151). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan objektivitas pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit - Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September 2009 sampai 2 Desember 2009.

Tahap selanjutnya adalah menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep, dalam hal ini konsep dijabarkan dalam ukuran-ukuran tertentu, biasanya dalam bentuk kategori - kategori beserta indikatornya. Kategori ini dibuat berdasarkan unit analisis, yaitu satuan yang akan dianalisis. Unit analisis dalam penelitian analisis isi bisa jadi apa saja yang diinginkan oleh peneliti, misalnya kata, kalimat, frase, ataupun gambar. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah unsur – unsur yang terdapat dalam teks berita, yaitu seputar berita kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September 2009 sampai dengan 2 Desember 2009.

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya populasi dan sampel. Maka tahap selanjutnya adalah penarikan sampel dari populasi yang ada. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri - cirinya akan diduga. (Masri Singarimbun dan Sofian

Effendy,1995:152. Populasi dalam penelitian ini adalah semua berita yang berkaitan dengan kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat periode 11 September 2009 sampai dengan 2 Desember 2009). Adapun batasan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita mengenai Kasus Bibit dan Chandra pada SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat Periode 11 September - 2 Desember 2009. Periode 11 September 2009 adalah dimulainya beberapa pimpinan KPK yang diperiksa dan Bibit - Chandra dijadikan tersangka 2 Desember adalah dimana periode ini kasus Bibit - Chandra dihentikan. Selama periode tersebut ditemukan 167 item berita mengenai kasus Bibit-Chandra, dengan demikian terdapat 167 item berita sebagai populasi. Item berita yang menjadi populasi berasal dari SKH Kedaulatan Rakyat sebanyak 60 item berita dan 107 item berita berasal dari Kompas.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Berita Kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat Selama periode 11 September 2009 sampai 2 Desember 2009 terdapat total 167 item berita sebagai populasi yang berasal dari SKH Kompas sebanyak 107 item berita sedangkan dari SKH Kedaulatan Rakyat sebanyak 60 berita. Sampel diambil dari populasi, sample yang digunakan adalah berita yang didalamnya memuat berita mengenai kasus Bibit – Chandra yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik sampling dengan *purposive sampling*, yaitu teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono,2006:154). Dari total 167

item berita dari kedua media, terdapat total 122 item berita mengenai kasus Bibit - Chandra yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang terdiri dari 44 item berita dari SKH Kedaulatan Rakyat dan 78 item berita dari SKH Kompas.

Teknik pengumpulan data pertama-tama dengan mentranskrip berita dari data primer, yakni kedua surat kabar tersebut. Selain itu data lainnya diperoleh dari sumber data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah, baik dari buku-buku, surat kabar, maupun tulisan-tulisan pada situs internet.

Dengan metode analisis isi, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikategorikan sebelumnya dan dimasukkan dalam lembar koding. Dengan lembar koding tersebut maka penghitungan data dapat dilakukan dengan distribusi frekuensi. Pengkodean akan dilakukan oleh dua orang atau lebih pengkode yang berpengalaman dalam bidang jurnalistik dan mengetahui isu yang diangkat oleh peneliti agar hasil penelitian lebih akurat. Kedua pengkode tersebut telah terlebih dahulu diberi penjelasan tentang definisi dan batasan-batasan dalam unit analisis dan kategorisasi yang berkaitan dengan lembar koding, agar nantinya dapat mempermudah dalam melakukan pengkodean.

Agar penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliabel, maka perlu dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas memunculkan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Secara sederhana prinsip dari uji reliabilitas adalah semakin tinggi persamaan hasil pengkodean diantara kedua pengkode, maka semakin *reliable* kategori yang telah disusun.

Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan. Maka dipakai metode *intercoder reliability* menggunakan formula Holsti dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan atas kategori yang digunakan yaitu:

$$\text{Reliability / CR} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan :

M = Jumlah pernyataan yang disetujui kedua pengkode

N1 + N2 = Jumlah pernyataan yang dikode oleh pengkode pertama
pengkode kedua

Setelah koefisien reliabilitas didapatkan maka langkah selanjutnya adalah mencari *index of reliability* dengan rumus yang dikembangkan Scott, yaitu:

$$P_i = \frac{\% \text{ persetujuan yang nyata} - \% \text{ persetujuan yang diharapkan}}{1 - \% \text{ persetujuan yang diharapkan}}$$

Data hasil penelitian diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditetapkan

melalui lembar koding, kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian.

Laporan hasil penelitian ini terbagi dalam empat bab besar. Bab yang pertama merupakan latar belakang pengambilan topik penelitian beserta penjelasan mengenai teori yang digunakan. Dalam bab ini pula, peneliti menentukan hal – hal apa saja yang menjadi fokus penelitian dalam pemberitaan KPK dan Polri dalam kasus Bibit dan Chandra di SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat pada rentang waktu mulai 11 September 2009 sampai dengan 2 Desember 2009.

Penjelasan mengenai obyek penelitian akan dijelaskan pada bab yang kedua. Dalam penelitian ini, artikel – artikel berita yang bersumber dari SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat pada rentang waktu mulai 11 September 2009 sampai dengan 2 Desember 2009 menjadi objek penelitian. Pada bab II akan dijelaskan sejarah dan hal umum lainnya tentang kedua perusahaan media tersebut beserta artikel – artikel berita yang akan diteliti dan juga deskripsi terjadinya kasus Bibit dan Chandra untuk lebih memperjelas bahan peneliti.

Bab III akan berisi analisis data, yaitu hasil pengkodean yang dilakukan oleh *coder* dan peneliti, uji reliabilitas, dan juga mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang telah dipilih untuk digunakan. Melalui hasil analisis yang terdapat pada bab III inilah, maka diketahui kecenderungan objektivitas kedua media dalam memberitakan KPK dan Polri dalam kasus Bibit dan Chandra. Hasil analisis secara keseluruhan kemudian disimpulkan dalam bab IV, yang berisi kesimpulan dan saran.